

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Bogor merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang juga menjadi bagian dari kawasan Jabodetabek. Jumlah penduduk di Kota Bogor pada tahun 2024 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebanyak 1,078,351 jiwa (BPS Kota Bogor, 2025). Luas wilayah Kota Bogor yaitu sebesar 111,39 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kepadatan penduduk Kota Bogor sebanyak 9.681 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kota Bogor paling besar berada di Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 241.738 jiwa atau 22,42% penduduk Kota Bogor.

Kepadatan penduduk di Kota Bogor berdampak signifikan terhadap masalah kesehatan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi balita. Tingginya jumlah penduduk dalam wilayah yang relatif terbatas menekan kapasitas layanan kesehatan dan mempersempit akses keluarga terhadap pangan bergizi. Kondisi hunian yang padat juga berkorelasi dengan sanitasi yang kurang memadai dan tingginya risiko penyakit infeksi, yang secara tidak langsung memengaruhi status gizi balita. Akibatnya, balita di wilayah padat penduduk lebih rentan mengalami masalah gizi seperti *stunting*.

Program penanganan *stunting* merupakan salah satu isu penting di Kota Bogor. *Stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dalam jangka panjang *stunting* dapat menghambat pertumbuhan kognitif, perkembangan motorik, dan kemampuan bahasa (WHO,

2013) serta dapat menyebabkan terjadinya *stunting* lintas generasi yang meningkatkan risiko mengidap penyakit tidak menular di masa dewasa (Trihono et al., 2015).

Stunting menjadi sebuah tantangan di Kota Bogor. Beberapa faktor yang menyebabkan *stunting* antara lain pernikahan dini, anemia pada remaja, anemia pada ibu hamil, ibu hamil dengan Kurang Energi Kronik (KEK), ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 150 cm, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan prematur, serta penyakit diare dan pneumonia pada balita. Selain faktor individu, faktor risiko lingkungan juga berkontribusi terhadap *stunting*, seperti kurangnya sanitasi dasar dan kepadatan penduduk yang menyebabkan kondisi lingkungan kurang sehat. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, serta pemahaman masyarakat tentang penanganan *stunting* bagi anak-anak mereka.

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sejak dalam kandungan untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia telah diamanatkan dalam berbagai regulasi yang salah satunya adalah penanganan *stunting*.

Pemerintah Kota Bogor melaksanakan penanganan *stunting* berdasar pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib memberikan pelayanan dasar, termasuk kesehatan, yang membuka ruang bagi pelaksanaan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani isu *stunting*.

Pelaksanaan program penanganan *stunting* di Kota Bogor pada tahun 2024 didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Pada pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita (BPB) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor, pada bulan Februari 2024 jumlah balita di Kota Bogor berjumlah 84.976 bayi. Dari jumlah tersebut, hasil bulan penimbangan balita menunjukkan jumlah angka *stunting* di Kota Bogor terdapat 1.805 balita yang tersebar di enam kecamatan. Dengan perincian 220 balita di Kecamatan Bogor Selatan, 137 balita di Kecamatan Bogor Timur, 299 balita di Kecamatan Bogor Utara, 288 balita di Kecamatan Bogor Tengah, 554 balita di Kecamatan Bogor Barat, dan 307 balita di Kecamatan Tanah Sareal.

Tabel 1 Data Jumlah *Stunting* di Kota Bogor

No	Kecamatan	Jumlah Balita	Jumlah <i>Stunting</i>
1	Kecamatan Bogor Selatan	16.516	220
2	Kecamatan Bogor Timur	8.253	137
3	Kecamatan Bogor Utara	15.271	299
4	Kecamatan Bogor Tengah	8.339	288
5	Kecamatan Bogor Barat	19.256	554
6	Kecamatan Tanah Sareal	17.341	307
Jumlah		84.976	1.805

Sumber: Data BPB Februari 2024, Dinas Kesehatan Kota Bogor

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah Indonesia menargetkan angka prevalensi *stunting* di Indonesia menurun menjadi 14%. Target tersebut dapat tercapai dengan melibatkan peran multisektor dan memastikan adanya sinkronisasi program dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa (Peristiyowati et al., 2023).

Upaya mendorong sinkronisasi program percepatan penurunan *stunting* juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Permendagri ini mengamanatkan pemerintah daerah agar memasukkan kegiatan penanganan *stunting* ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memastikan intervensi lintas sektor untuk penanganan *stunting* agar dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan tingkat kelurahan/desa. Oleh karena itu, kabupaten/kota harus melakukan upaya konvergensi dalam penanganan *stunting*. Upaya konvergensi merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama. Upaya ini harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan.

Pemerintah Kota Bogor terus berupaya melakukan penanganan *stunting*. Pemerintah Kota Bogor yang memiliki misi mewujudkan Kota Sehat terus berupaya menurunkan angka *stunting*. Berbagai program penanganan *stunting* menjadi fokus utama untuk menciptakan anak-anak Kota Bogor menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Penanganan *stunting* menjadi langkah pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerus yang unggul dan dapat bersaing dengan baik secara intelektual dan kreatifitas di tingkat nasional ataupun tingkat internasional (Alamsyah et al., 2024).

Berdasarkan data dari Bapperida Kota Bogor, anggaran program penanganan *stunting* di Kota Bogor tahun 2024 mencapai Rp 122.750.671.737, yang dialokasikan untuk berbagai perangkat daerah, dengan porsi terbesar diberikan kepada Dinas Kesehatan yakni sebesar Rp 100.121.486.484. Anggaran ini digunakan dalam upaya penanganan *stunting* melalui intervensi kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan,

sosial, dan infrastruktur. Jika dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun 2024 yang disepakati sebesar Rp3,107 triliun, maka alokasi anggaran *stunting* hanya sekitar 3,95 persen dari total belanja daerah. Porsi ini masih relatif kecil dibanding kebutuhan penanganan *stunting* yang kompleks.

Tabel 2 Rekapitulasi Anggaran *Stunting* Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran
1	Dinas Kesehatan	Rp 100,121,486,484
2	Dinas PPKB	Rp 5,943,112,600
3	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	Rp 35,550,000
4	Dinas Kominfo	Rp 344,226,132
5	Dinas Pendidikan	Rp 1,196,926,100
6	Dinas PUPR	Rp 14,540,075,221
7	Dinas Sosial	Rp 490,345,200
8	Lainnya (Kesra)	Rp 78,950,000
Jumlah		Rp 122,750,671,737

Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2025

Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam upaya penanganan *stunting* di Kota Bogor. Alokasi anggaran yang tersedia harus dibagi untuk berbagai prioritas pembangunan, sehingga intervensi spesifik gizi dan sensitif gizi belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih inovatif dan efisien, tidak hanya mengandalkan peningkatan anggaran, tetapi juga optimalisasi sumber daya yang sudah ada di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, upaya kolaborasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait masih menghadapi kesulitan. Koordinasi lintas sektor cenderung bersifat formalitas dan belum memiliki persepsi dalam satu kerangka kerja yang sama. Ego sektoral serta lemahnya mekanisme komunikasi menyebabkan potensi

kolaborasi belum terkelola secara optimal. Akibatnya, berbagai program penanganan *stunting* kurang memberikan dampak yang signifikan.

Pemerintah Kota Bogor dalam upaya menangani *stunting* memiliki beberapa program, di antaranya yaitu (1) TALEUS BOGOR (Tanggap Lengitkeun *Stunting* ti Bogor); (2) BATAGOR (Ibu Anak Tangguh Kota Bogor); (3) BASUH ANTING (Bapak Asuh Anak *Stunting*); (4) PENTING BERES (Pantau dan Cegah Anak *Stunting* Bersama Rujukan Efektif Sistematis); (5) Bunda Peduli *Stunting*; dan (6) PENTING-LUR (Peduli *Stunting* melalui Telur).

Tabel 3 Daftar Program Penanganan *Stunting* di Kota Bogor

No	Nama Program	Penjelasan
1	TALEUS BOGOR (Tanggap Lengitkeun <i>Stunting</i> ti Bogor)	Upaya pencegahan dan penanggulangan <i>stunting</i> secara sinergis terpadu, berjenjang dengan pendekatan <i>continuum of care</i> .
2	BATAGOR (Ibu Anak Tangguh Kota Bogor)	Merespons isu-isu pada anak usia dini, khususnya yang terkait dengan asupan gizi, pola pengasuhan, dan media komunikasi, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama merespons permasalahan tersebut.
3	BASUH ANTING (Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i>)	Kepala perangkat daerah menjadi bapak asuh anak <i>stunting</i> dengan memberikan asupan gizi.
4	PENTING BERES (Pantau dan Cegah Anak <i>Stunting</i> Bersama Rujukan Efektif Sistematis)	Melakukan pendampingan dan memberikan rujukan kepada balita bermasalah gizi.
5	Bunda Peduli <i>Stunting</i>	SK Bunda Peduli <i>Stunting</i> Kota bogor, SK Bunda Peduli <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan, SK Bunda Peduli <i>Stunting</i> tingkat Kelurahan.
6	PENTING-LUR (Peduli <i>Stunting</i> melalui Telur)	Kontribusi ASN di Pemerintah Kota Bogor membantu penanganan <i>stunting</i> melalui pemberian telur kepada balita <i>stunting</i> (1 kg telur/asn/bulan)

Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2025

Dalam penelitian ini penulis fokus menyoroti kolaborasi pada program PENTING-LUR (Peduli *Stunting* melalui Telur). Program ini merupakan salah satu program kolaborasi yang mana setiap ASN Pemerintah Kota Bogor diwajibkan memberikan sumbangan 1 kg telur perbulan untuk anak *stunting* melalui mekanisme iuran yang diambil dari potongan gaji, kemudian dihimpun oleh perangkat daerah lalu diserahkan kepada kecamatan sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 100.3.4/2121-DPPKB Tentang Imbauan Seluruh ASN dan Pegawai BUMD/BLUD Berkontribusi di Program PENTING-LUR.

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kelurahan (Per Kelurahan)	Jumlah Sumbung (kg)	RUB (Rp)	Total Sumbung (kg)	Total Sumbung (Rp)
1	1. Bogor Selatan	11	11	11	110	110	110
2	2. Bogor Barat	16	16	16	160	160	160
3	3. Bogor Tengah	11	11	11	110	110	110
4	4. Tanah Sereal	11	11	11	110	110	110
5	5. Bogor Utara	8	8	8	80	80	80

Gambar 1 Surat Edaran Program PENTING-LUR

Melalui program PENTING-LUR Pemerintah Kota Bogor menggunakan potensi besarnya dalam konteks kolaborasi penanganan *stunting*, khususnya di internalnya sendiri karena melibatkan seluruh ASN, seluruh pegawai BUMD, petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di wilayah.

Hal ini yang mendasari minat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan perspektif yang lebih jelas tentang dinamika kolaborasi yang terjadi pada program PENTING-LUR. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “**Kolaborasi Penanganan *Stunting* Dalam Tata Kelola Program Peduli *Stunting* melalui Telur (PENTING-LUR) di Kota Bogor**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masalah pemahaman masyarakat tentang isu *stunting* masih rendah.
2. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam penanganan *stunting*.
3. Masalah kolaborasi penanganan *stunting* yang belum optimal.

1.3. Batasan Masalah

Penentuan fokus penelitian dalam studi ini dibatasi hanya pada wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Batasan ini ditetapkan secara objektif dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

1. Persentase jumlah penduduk di Kecamatan Bogor Barat paling besar dibanding kecamatan lain yakni 241.738 atau 22,42% penduduk Kota Bogor.
2. Jumlah balita di Kecamatan Bogor Barat paling banyak dibanding kecamatan lain yakni 19.256 dari total 84.976 balita.
3. Jumlah balita *stunting* di Kecamatan Bogor Barat yang tinggi dibanding kecamatan lain yakni 554 dari 1.805 balita.

4. Jumlah kader TPK di Kecamatan Bogor Barat paling banyak dibanding kecamatan lain yakni sebanyak 202 tim dengan rincian yang terdiri dari 366 kader KB, 202 kader PKK, dan 38 bidan.

Pada dasarnya permasalahan kolaborasi dalam konteks tata kelola penanganan *stunting* memiliki karakteristik yang hampir sama pada setiap kecamatan. Dengan data jumlah penduduk, jumlah balita, jumlah balita *stunting*, dan jumlah kader TPK yang paling banyak di Kota Bogor adalah Kecamatan Bogor Barat, maka dari itu secara objektif penulis meyakini bahwa seluruh pembahasan, analisis data, serta rekomendasi kebijakan cukup hanya dengan mengacu pada kondisi di Kecamatan Bogor Barat.

1.4. Rumusan Masalah

Merujuk dari identifikasi masalah yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kolaborasi penanganan *stunting* dalam tata kelola program PENTING-LUR di Kota Bogor?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kolaborasi penanganan *stunting* dalam tata kelola program PENTING-LUR di Kota Bogor?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi penanganan *stunting* dalam tata kelola program PENTING-LUR di Kecamatan Bogor Barat.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat kolaborasi penanganan *stunting* dalam tata kelola program PENTING-LUR di Kecamatan Bogor Barat.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menambah kajian teori dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu lainnya yang berkaitan dengan studi penelitian ini. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai acuan yang diharapkan berguna bagi upaya kolaborasi penanganan *stunting*. Penelitian ini dilakukan dengan fakta yang ada di lapangan atas hasil observasi sehingga memberikan pemikiran strategi akan kajian ke depannya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait konsep kolaborasi dalam upaya penanganan *stunting* di Kota Bogor dan daerah lainnya di Indonesia. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan studi pendahuluan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kolaborasi penanganan *stunting*. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki permasalahan dalam rangka kolaborasi penanganan *stunting*.

2. Manfaat praktis

- Bagi semua pihak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi yang mudah dipahami mengenai pentingnya kolaborasi antar pihak dalam penanganan *stunting* secara umum, sehingga

meningkatkan kesadaran dan partisipasi semua pihak dalam menjaga kesehatan anak dan mencegah *stunting* sejak dini, khususnya di Kota Bogor dalam pengembangan riset di masa mendatang.

- Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk lebih serius di dalam merumuskan kebijakan terkait kolaborasi penanganan *stunting* di Kota Bogor.

- Bagi pengelola

Hasil penelitian ini diharapkan dapat permasalahan terkait upaya kolaborasi dalam penanganan *stunting*.

- Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kolaborasi penanganan *stunting* untuk menunjang pemenuhan gizi balita dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting*.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian bertujuan untuk mempermudah dalam melihat, memahami, dan menelaah pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan perihal yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang akan dikaji dan pokok dari bab ini dimulai dari data tentang permasalahan

penanganan *stunting*, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan judul yang dipaparkan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini terdiri dari:

1. Penelusuran dan penelaahan penelitian melalui pangkalan data yang tersedia yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.
2. Kajian pustaka yang berisi tentang pembahasan konsep kolaborasi yang mencakup kolaborasi dalam upaya penanganan *stunting* yang terdiri unsur yang berkepentingan langsung dalam upaya penanganan *stunting*.
3. Kerangka pemikiran yang berisikan uraian alur pikir dalam memahami permasalahan dengan berlandaskan pada penggunaan teori-teori.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menerangkan sebuah metode penelitian yang digunakan dan menjelaskan sebuah pendekatan serta jenisnya. Kemudian penulis juga mengemukakan lokasi penelitian yang diteliti, bagaimana

teknik pengumpulan datanya, serta teknik analisis data yang akan dipakai.



BAB IV: TATA KELOLA PENANGANAN *STUNTING* DALAM PROGRAM PENTING LUR

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis dimensi kolaborasi Perry dalam tata kelola program PENTING-LUR, serta pembahasan faktor pendukung dan penghambat kolaborasi program PENTING-LUR.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi teori, dan saran.

Bagian Akhir

Bagian akhir dari tesis ini yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

